

**PENGARUH PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PEKOTAAN DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DKI JAKARTA TAHUN 2011-2020**

**Ikrima Wandani<sup>1</sup>, Sugi Suhartono<sup>2</sup>**

Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia. Corresponding Author. Email: [ikrimawandani1@gmail.com](mailto:ikrimawandani1@gmail.com)  
<sup>2</sup>Dosen Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia. Email: [sugi.suhartono@kwikkiangie.ac.id](mailto:sugi.suhartono@kwikkiangie.ac.id)

**Article Info**

**Article History:**

Submission :

Revised :

Accepted :

**Keywords:**

Restaurant Tax, Hotel Tax, Entertainment Tax, Rural and Urban Land and Building Tax, Motor Vehicle Tax, Regional Original Income.

**Citations**

**DOI**

**URL:**

**Abstract**

*Regional Original Revenue is a source of regional income to carry out government and development in each of these regions. From the source of local revenue, which has the largest contribution is local taxes. The purpose of this study was to determine the effect of Restaurant Tax, Hotel Tax, Entertainment Tax, Rural and Urban Land and Building Tax and Motor Vehicle Tax on Regional Original Income. The sample used is the amount of restaurant tax receipts, hotel taxes, entertainment taxes, rural and urban land and building taxes and motor vehicle taxes for the period 2011-2020. The sampling technique used is purposive sampling, namely the researcher's technique in determining the sample by setting special criteria according to the research. The data analysis technique used is descriptive statistics, classical assumption test, F statistic test, t statistic test and coefficient of determination. Multiple linear regression analysis test using Microsoft Excel 2019 software. The conclusion of this study is that it is not proven that restaurant taxes have a significant effect on local revenue. It is not proven that hotel tax has a positive effect on local revenue. There is sufficient evidence that the entertainment tax, rural and urban land and building tax and motor vehicle tax have a positive and significant effect on local revenue.*

**1. Pendahuluan**

Dalam segi pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi, yang terdiri dari kabupaten atau kota. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahannya dalam meningkatkan keefisienan dan keefektifitasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta layanan publik. Dengan ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang disebut otonomi daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus penyelenggaraan Pemerintahan daerah otonom serta kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan otonomi daerah yang berdasarkan desentralisasi, desentralisasi ialah penyerahan penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dimana pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengurus pemerintahannya atau daerahnya dengan pembangunan. Tujuan dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan daerah untuk melaksanakan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di setiap daerah tersebut. Dengan hal itu, Pendapatan Asli daerah memegang peran penting, apabila pendapatan semakin tinggi maka semakin tinggi kemandirian daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dipungut pemerintah daerah yang akan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah tersebut dan digunakan untuk memajukan daerahnya. Pajak daerah ialah salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah dijadikan sebagai ukuran untuk melihat tingkat kemandirian pemerintah daerah. Dengan hal itu, maka pemerintah harus meningkatkan sumber potensi sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah supaya target terealisasi serta pemerintah dapat melakukan pembangunan di daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber pendapatan asli daerah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lain-lain. Dari sumber

© Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta ini dilindungi undang-undang

1. Dilarang mengutip, menyebarkan, atau menyalin sebagian atau seluruh isi dari artikel ini tanpa mengizinkan IBIKKG.  
 a. Pengutipan harus menyebutkan sumber dan nama penulis asli.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pendapatan asli daerah tersebut, yang memiliki kontribusi terbesar adalah pajak daerah. Penerimaan pajak daerah bersumber dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Air Tanah, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Parkir. Dengan ini menunjukkan bahwa peran pajak daerah sangat penting bagi Pendapatan Asli Daerah, maka pemerintah harus memaksimalkan pendapatan pajak daerah agar penerimaan pendapatan daerah mengalami peningkatan.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta memeriksa kembali untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran 2020 untuk menaikkan pendapatan asli daerah sebesar 28 triliun dikarenakan mengalami penurunan. Penurunan terjadi karena adanya masa pandemi covid dan pemerintah menetapkan adanya kebijakan yaitu pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menurunkan penyebaran virus covid-19. Pada saat pemerintah menetapkan PSBB, pendapatan asli daerah DKI Jakarta diproyeksikan mengalami penurunan drastis hingga 54% dari 57,5 triliun menurun menjadi 26,4 triliun. Dari pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan adalah pajak daerah dikarenakan adanya penutupan pada sektor usaha. Pemrov DKI menurunkan targetnya dari Rp. 50,17 triliun menjadi Rp. 22,5 triliun dengan presentase 45% dari target. Komponen pajak daerah sangat mengalami penurunan yang signifikan karena disebabkan oleh faktor ditutupnya berbagai sektor usaha akibat adanya virus Covid-19 dan adanya peraturan pemerintah tentang kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) (Jakarta.bisnis.com).

DKI Jakarta merupakan kota terbesar yang setiap tahun jumlah penduduknya mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah penduduk maka akan banyak sektor usaha yang meningkat seperti meningkatnya jumlah restoran, hotel, hiburan dan bangunan. Disamping meningkatnya jumlah penduduk di DKI Jakarta, maka secara tidak langsung jumlah kendaraan bermotor juga akan meningkat disetiap tahunnya sebagai alat transportasi penduduk sehari-hari.

Jumlah restoran pada saat ini semakin banyak dari berbagai jenis seperti rumah makan, cafe atau sejenisnya. Pada saat ini anak muda banyak mencari tempat yang nyaman untuk makan dan juga nongkrong. Dengan demikian maka akan mempengaruhi penerimaan pajak restoran. Semakin banyak pengunjung maka semakin banyak pendapatannya. Berdasarkan hasil penelitian dari (Rianto, 2021) bahwa Pajak Restoran berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang Periode 2011-2015 sedangkan menurut penelitian (Wulandari & Kartika, 2021) Pajak Restoran tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016-2019.

Banyaknya tempat wisata di DKI Jakarta membuat banyak wisatawan yang datang baik dari luar daerah maupun dari daerah. Wisatawan yang berasal dari luar daerah tentunya akan membutuhkan tempat sementara untuk beristirahat seperti hotel dan yang lainnya. Jumlah hotel semakin berkembang di daerah DKI Jakarta, semakin banyak yang menghuni hotel maka akan mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Berdasarkan hasil penelitian (Rianto, 2021) bahwa Pajak Hotel berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang Periode 2011-2015. Sedangkan hasil penelitian (Wulandari & Kartika, 2021) Pajak Hotel tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016-2019

Kota Jakarta memiliki banyak sekali tempat hiburan yang banyak dikunjungi masyarakat seperti bioskop, karaoke, pagelaran musik, pertandingan olahraga dan yang lainnya. Adanya tempat hiburan seperti diatas maka akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan dikarenakan adanya pungutan biaya saat menikmati hiburan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian (Deno et al., 2021) bahwa pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. Namun berbeda dengan penelitian (Biringkanee & Tammu, 2021) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

DKI Jakarta terbatas akan sumber daya alam yaitu ruang terbuka (tanah). Kelangkaan ini akan menyebabkan barang atau jasa menjadi semakin mahal, dalam artian ini harga tanah dan bangunan semakin lebih mahal sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan juga menjadi meningkat. Jika setiap bangunan sudah dimiliki oleh orang lain, badan dan/atau pihak lain yang berpotensi dikenakan Pajak bumi dan bangunan maka harga akan lebih mahal. Meningkatnya penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan akan menimbulkan kenaikan pada pajak daerah sehingga akan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Pada penelitian (Marta et al., 2020) bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berpengaruh positif dan nyata secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 – 2019. Sedangkan menurut penelitian (Setiawati et al., 2021) bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Batang Hari.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi beroda yang digunakan di jalur darat. Berdasarkan data di Badan Pusat Statistik jumlah kendaraan bermotor meningkat drastis dari tahun 2019 dengan jumlah 11.839.921 unit kendaraan menjadi 20.221.821 unit kendaraan pada tahun 2020. Banyaknya kendaraan akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pada penelitian (Setiawan, 2021) Pajak Kendaraan Bermotor terdapat pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nugrahwati et al., 2019) bahwa ada Pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### 1.1 Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2019:16) Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang terutang kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan mendapatkan imbalan tidak secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran merupakan fasilitas yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dipungut biaya, yang meliputi rumah makan, kantin, kafetaria, bar, warung, dan sejenisnya yang termasuk jasa boga/katering. Pajak restoran dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel, Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas yang menyediakan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan bayaran, meliputi losmen, motel, wisma pariwisata, gubuk pariwisata, rumah penginapan, pesanggrahan dan rumah kos atau sejenisnya dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan. Pajak Hiburan adalah pajak atas diselenggarakannya hiburan. Sedangkan Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, tontonan, permainan dan keramaian yang dapat dinikmati dengan pungutan biaya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, atau PBB artinya pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali daerah yang digunakan untuk kegiatan usaha seperti perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan beroda yang di darat dan digerakan oleh mesin yang berupa motor atau peralatan lainnya, dengan mengubah sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

### 1.2 Pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Pada saat ini bisnis restoran semakin banyak dan beragam seperti kafe, rumah makan, bar atau yang sejenisnya dengan mengikuti trend masa kini sehingga menarik pengunjung untuk datang ke restoran. Tumbuhnya berbagai macam jenis restoran maka akan mempengaruhi penerimaan pajak restoran. Jika penerimaan pajak restoran meningkat maka penerimaan pajak daerah akan meningkat serta akan mempengaruhi kenaikan penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan penelitian (Rianto, 2021) Pajak Restoran berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang (Periode



2011-2015). Berdasarkan penelitian (Biringkanae & Tammu, 2021) memperoleh hasil bahwa Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan penelitian (Yanuar & Agoes, 2019) bahwa Pajak restoran memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta pada 2014-2016.

*H<sub>1</sub>: Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.*

### 1.3 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh hotel dengan dipungut biaya-biaya, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. DKI Jakarta mempunyai banyak tempat pariwisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri maka dengan itu, wisatawan tentunya akan membutuhkan tempat untuk beristirahat atau penginapan di tempat inap seperti hotel atau tempat penginapan lainnya. Setiap tahun jumlah objek hotel di DKI Jakarta meningkat sehingga akan mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Jika pajak hotel meningkat maka pajak daerah ikut meningkat dan tentunya akan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil penelitian dari (Rianto, 2021) menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang (Periode 2011-2015).

*H<sub>2</sub>: Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.*

### 1.4 Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Hiburan merupakan pajak yang dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan adanya bayaran. DKI Jakarta memiliki banyak tempat hiburan untuk dikunjungi masyarakat. Objek Hiburan di DKI Jakarta juga meningkat disetiap tahunnya dengan hal itu akan banyak pengunjung yang datang dan tertarik akan tempat hiburannya sehingga akan mempengaruhi penerimaan pajak hiburan. Meningkatnya penerimaan pajak hiburan akan meningkatkan pula pajak daerah, dengan hal itu berpengaruh pula terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil penelitian (Deno et al., 2021) bahwa Pajak Hiburan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

*H<sub>3</sub>: Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.*

### 1.5 Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan. DKI Jakarta terbatas akan sumber daya alam yaitu ruang terbuka (tanah). Kelangkaan ini akan menyebabkan barang atau jasa menjadi semakin mahal, dalam artian ini harga tanah dan bangunan semakin lebih mahal sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan juga menjadi meningkat. Jika setiap bangunan sudah dimiliki oleh orang lain, badan dan/atau pihak lain yang berpotensi dikenakan Pajak bumi dan bangunan maka harga akan lebih mahal. Meningkatnya penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan akan menimbulkan kenaikan pada pajak daerah sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan penelitian (Marta et al., 2020) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berpengaruh positif dan nyata secara parsial terhadap PAD Kabupaten Bandung Tahun 2013–2019. (Yanuar & Agoes, 2019) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta pada 2014-2016.

*H<sub>4</sub>: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.*

### 1.6 Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Meningkatnya penerimaan pajak kendaraan akan meningkatkan pula pajak daerah



sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan penelitian (Setiawan, 2021) bahwa Pajak Kendaraan Bermotor terdapat pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

*H<sub>5</sub>: Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah*

## 2. Metode Penelitian

Penggunaan objek pada penelitian merupakan jumlah penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta pada tahun 2011-2020 yang diambil dari pajak daerah yaitu Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Kendaraan Bermotor. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah non-probability sampling yaitu purposive sampling yang merupakan teknik peneliti dalam menentukan sampel dengan menetapkan kriteria khusus sesuai dengan penelitian, yaitu: (1) Jumlah penerimaan Pajak Restoran pada periode 2011-2020; (2) Jumlah penerimaan Pajak Hotel pada periode 2011-2020; (3) Jumlah penerimaan Pajak Hiburan pada periode 2011-2020; (4) Jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada periode 2011-2020; (5) Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada periode 2011-2020.

### 2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah. Periode data yang digunakan pendapatan asli daerah adalah periode tahun 2011-2020 di DKI Jakarta.

### 2.2 Variabel Independen

#### 2.2.1 Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Data yang digunakan pajak restoran adalah realisasi penerimaan pajak restoran di DKI Jakarta periode tahun 2011-2020.

#### 2.2.2 Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Data yang digunakan pajak hotel adalah realisasi penerimaan pajak hotel di DKI Jakarta periode tahun 2011-2020.

#### 2.2.3 Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Data yang digunakan pajak hiburan adalah realisasi penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta periode tahun 2011-2020.

#### 2.2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Data yang digunakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di DKI Jakarta periode tahun 2011-2020.

#### 2.2.5 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Data yang digunakan pajak kendaraan bermotor adalah realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta periode tahun 2011-2020.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, menunjukkan bahwa hasil output SPSS data Pendapatan Asli Daerah yang paling rendah pada tahun 2011 yaitu dengan jumlah Rp. 17.825 Milyar. Sedangkan data Pendapatan Asli Daerah yang paling tinggi adalah Rp. 45.707 Milyar pada tahun 2019. Rata-rata penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011-2020 adalah sebesar Rp. 33.892 Milyar. Standar deviasi Pendapatan Asli Daerah adalah Rp. 9.459 Milyar. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi maka nilai rata-rata dapat digunakan sebagai indikasi yang baik dari seluruh data.



Data Pajak Restoran menunjukkan nilai paling rendah adalah Rp. 1.032 Milyar terjadi pada tahun 2011. Penerimaan paling tinggi pada pajak restoran terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.609 Milyar. Nilai rata-rata pajak restoran tahun 2011-2020 adalah Rp. 2.183 Milyar. Standar deviasi Pajak Restoran adalah Rp. 829 Milyar. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi maka nilai rata-rata dapat digunakan sebagai indikasi yang baik dari seluruh data.

Data Pajak Hotel menunjukkan nilai paling rendah adalah Rp. 753 Milyar terjadi pada tahun 2020. Penerimaan paling tinggi pada pajak hotel terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.761 Milyar. Nilai rata-rata pajak hotel tahun 2011-2020 adalah Rp. 1.301 Milyar. Standar deviasi Pajak Hotel adalah Rp. 349 Milyar. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi maka nilai rata-rata dapat digunakan sebagai indikasi yang baik dari seluruh data.

Data Pajak Hiburan menunjukkan nilai paling rendah adalah Rp. 220 Milyar terjadi pada tahun 2020. Penerimaan paling tinggi pada pajak hiburan terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 859 Milyar. Nilai rata-rata pajak hiburan tahun 2011-2020 adalah Rp. 560 Milyar. Standar deviasi Pajak Hiburan adalah Rp. 235 Milyar. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi maka nilai rata-rata dapat digunakan sebagai indikasi yang baik dari seluruh data.

Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menunjukkan nilai paling rendah adalah Rp. 2.635 Milyar terjadi pada tahun 2011. Penerimaan paling tinggi pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 9.649 Milyar. Nilai rata-rata Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2011-2020 adalah Rp. 6.331 Milyar. Standar deviasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Rp. 2.634 Milyar. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi maka nilai rata-rata dapat digunakan sebagai indikasi yang baik dari seluruh data.

Data Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan nilai paling rendah adalah Rp. 3,664 Milyar terjadi pada tahun 2011. Penerimaan paling tinggi pada Pajak Kendaraan Bermotor terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 8,844 Milyar. Nilai rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2011-2020 adalah Rp. 6,387 Milyar. Standar deviasi Pajak Kendaraan Bermotor adalah Rp. 1,944 Milyar. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi maka nilai rata-rata dapat digunakan sebagai indikasi yang baik dari seluruh data.

**Tabel 1:** Hasil Statistik Deskriptif

Dalam Milyar Rupiah

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	17.826	45.707	33.892	9.459
Pajak Restoran	1.032	3.609	2.183	829
Pajak Hotel	753	1,761	1.301	349
Pajak Hiburan	220	859	560	235
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.635	9.649	6.331	2.634
Pajak Kendaraan Bermotor	3.664	8.844	6.387	1.944

Sumber: Output SPSS 25

### 3.2 Uji asumsi klasik

#### 3.2.1 Uji Normalitas

Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* (K-S). Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil menunjukkan bahwa nilai sig  $0,200 > 0,05$ , artinya data residual berdistribusi normal.

**Tabel 2:** Hasil Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 <sup>c,d</sup>
------------------------	---------------------

Sumber: Output SPSS 25

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dilakukan dengan cara pengumpulan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang dilakukan, diperoleh nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, artinya model regresi dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya multikolinearitas. Nilai tolerance dan VIF yang didapatkan yaitu pajak restoran 0,210 dan 4,767, pajak hotel 0,135 dan 7,381, pajak hiburan 0,313 dan 3,193, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 0,153 dan 6,521 dan pajak kendaraan bermotor 0,790 dan 1,266.

**Tabel 3:** Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF
Pajak Restoran	0.210	4.767
Pajak Hotel	0.135	7.381
Pajak Hiburan	0.313	3.193
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0.153	6.521
Pajak Kendaraan Bermotor	0.790	1.266

Sumber: Output SPSS 25

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji Run Test. Berdasarkan hasil uji autokorelasi, hasil menunjukkan bahwa nilai sig 1,000 > 0,05, artinya tidak terdapat adanya autokorelasi pada model regresi.

### 3.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji yang digunakan pada uji heteroskedastisitas adalah uji glejser. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, hasil menunjukkan bahwa nilai sig > 0,05, artinya tidak terjadi adanya heteroskedastisitas pada model persamaan regresi sehingga layak untuk digunakan dalam memprediksi pendapatan asli daerah berdasarkan variabel yang mempengaruhinya. Nilai sig yang didapatkan yaitu pajak restoran 0,855, pajak hotel 0,875, pajak hiburan 0,625, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 0,561 dan pajak kendaraan bermotor 0,550.

**Tabel 4:** Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Sig.
(Constant)	0.979
Pajak Restoran	0.855
Pajak Hotel	0.875
Pajak Hiburan	0.625
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0.561
Pajak Kendaraan Bermotor	0.550

Sumber: Output SPSS 25



**Tabel 5: Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Coefficients	P-value
(Constant)	6.296.583.735.392,08	0.0156
Pajak Restoran	0.903	0.1526
Pajak Hotel	-6.694	0.0207
Pajak Hiburan	15.243	0.0012
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.839	0.0003
Pajak Kendaraan Bermotor	1.224	0.0010
Nilai F		209.1473
Signifikansi F		0.000
Adjusted R Square		0.991

Sumber: Output Microsoft Excel 2019

### 3.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil penelitian analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel 2019, menghasilkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 6.296.583.735.392,08 + 0.903X_1 - 6.694X_2 + 15.243X_3 + 2.839X_4 + 1.224X_5 + \varepsilon$$

### 3.4 Uji Statistik F (Uji Kelayakan Model)

Hasil dari uji statistik F menunjukkan bahwa  $\text{sig } 0,000 < 0,05$ , artinya model regresi layak untuk diuji. Nilai F pada tabel sebesar 209.1473 yang lebih besar dari nilai F tabel yaitu sebesar 5.050, maka hasil menunjukkan bahwa terbukti Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### 3.5 Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parameter Individual)

Hasil tabel 5, diperoleh nilai P-Value Pajak Restoran sebesar 0,1526. Berdasarkan ketentuan hipotesis maka hasil pengujiannya adalah tidak tolak  $H_0$  karena nilai P-value  $0,1526 > 0,05$  dengan koefisien sebesar 0,903. Hasil ini menunjukkan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian sejalan dengan (Wulandari & Kartika, 2021) bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016-2019.

Berdasarkan tabel 5, pajak hotel memperoleh nilai P-value sebesar 0,0207. Berdasarkan ketentuan hipotesis maka hasil pengujiannya adalah tidak tolak  $H_0$  karena nilai P-value  $0,0207 < 0,05$  dengan koefisien -6,694. Hasil ini menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Rianto, 2021) bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016-2019.

Berdasarkan tabel 5, pajak hiburan memperoleh nilai P-value sebesar 0,0012. Berdasarkan ketentuan hipotesis maka hasil pengujiannya adalah Tolak  $H_0$  karena nilai P-value  $0,0012 < 0,05$  dengan koefisien 15,243. Hasil ini menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Deno et al., 2021) bahwa Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan tabel 5, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan memperoleh nilai P-value sebesar 0,0003. Berdasarkan ketentuan hipotesis maka hasil pengujiannya adalah Tolak  $H_0$  karena nilai P-value  $0,0003 < 0,05$  dengan koefisien 2,839. Hasil ini menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Marta et al., 2020) bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berpengaruh positif dan nyata secara parsial terhadap PAD Kabupaten Bandung Tahun 2013 – 2019.

Berdasarkan tabel 5, pajak kendaraan Bermotor memperoleh nilai P-value sebesar 0,0010. Berdasarkan ketentuan hipotesis maka hasil pengujiannya adalah Tolak  $H_0$  karena nilai P-value  $0,0010 <$

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





0,05 dengan koefisien 1,224. Hasil ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Setiawan, 2021) bahwa Pajak Kendaraan Bermotor terdapat pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### 3.6 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pada tabel 5, hasil  $R^2$  diperoleh sebesar 0,991 atau 99,1% yang artinya bahwa variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh variabel independen yaitu pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan sisanya yaitu 0,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang terdapat diluar penelitian ini.

### 3.7 Pajak Restoran

Hasil uji statistik t pada penelitian ini, menunjukkan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah karena nilai P-value  $0,1526 > 0,05$  dengan koefisien 0,903 yang artinya tidak tolak  $H_0$ . Berdasarkan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah maka hasil penelitian ini adalah menolak hipotesis 1.

Penerimaan pajak restoran dari tahun 2011 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan secara terus menerus tetapi dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis hingga 46%. Kenaikan pajak restoran dari tahun ke tahun rata-rata sebesar 9%. Sedangkan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2011 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan tetapi tahun 2018 mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 1%. Kemudian tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5% dan tahun 2020 terjadi penurunan kembali sebesar 18%.

Pajak restoran memiliki target dan realisasi setiap tahunnya. Pada tahun 2014 dan tahun 2016 penerimaan pajak restoran tidak mencapai target. Penerimaan yang didapatkan pada tahun 2014 sebesar 91% dan pada tahun 2016 sebesar 94%. Selain tahun tersebut dari tahun 2011-2020 target tercapai. Rata-rata penerimaan yang terealisasi dari tahun 2011-2020 adalah sebesar 5%. Pada tahun 2020 terjadi adanya pandemi virus covid-19 namun target pajak restoran terealisasi sebesar 5%. Target pajak restoran tahun 2020 diturunkan sebesar 48% dari target 2019.

Faktor yang membuat pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dikarenakan tidak konsisten dengan perubahan antara realisasi dan anggaran pendapatan asli daerah dengan pajak restoran. Pada anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah mengalami penurunan tetapi anggaran dan realisasi pajak restoran mengalami kenaikan. Dengan demikian pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di DKI Jakarta.

Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 dikarenakan adanya virus Covid-19 dengan kasus tinggi yang menggoyahkan perekonomian. Tingginya kasus covid-19 di Jakarta, pemerintah menetapkan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran virus tersebut. Pembatasan sosial berskala besar mengakibatkan banyak tempat makan atau restoran tutup dan adanya pembatasan jam buka sampai jam tutup restoran serta juga membatasi pelanggan untuk makan ditempat sehingga pendapatan pada restoran turun.

### 3.8 Pajak Hotel

Hasil uji statistik t pada penelitian ini, menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah karena nilai P-value  $0,0207 < 0,05$  dengan koefisien -6,694 yang artinya Tidak Tolak  $H_0$ . Berdasarkan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah maka hasil penelitian ini adalah menolak hipotesis 2.

Penerimaan pajak hotel dari tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami kenaikan tetapi tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 8%. Setelah mengalami penurunan, tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan dan tahun 2020 terjadi penurunan kembali yang sangat drastis hingga 57%. Sedangkan pendapatan asli daerah pada tahun 2015 mengalami kenaikan sedikit yaitu sebesar 8% dan pada pandemi tahun 2020 pendapatan asli daerah mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 18%.

Pajak Hotel setiap tahunnya memiliki target dan realisasi. Pada tahun 2014 hingga tahun 2016 dan tahun 2019 penerimaan pajak hotel tidak mencapai target. Penerimaan yang didapatkan pada tahun 2014 sebesar 99%, tahun 2015 sebesar 85%, tahun 2016 sebesar 94% dan pada tahun 2019 sebesar 98% masing-masing dari targetnya. Sedangkan untuk selain tahun tersebut target tercapai. Rata-rata penerimaan yang terealisasi dari tahun 2011-2020 adalah sebesar 4%. Pada tahun 2020 terjadi adanya pandemi virus covid-



19 namun target pajak hotel terealisasi sebesar 11,6%. Target pajak hotel pada tahun 2020 diturunkan sebesar 63% dari target 2019.

Faktor yang menyebabkan pajak hotel berpengaruh negatif karena pada realisasi dan anggaran pajak hotel mengalami penurunan dibanding dengan pendapatan asli daerah di DKI Jakarta. Jika pada anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah mengalami kenaikan tetapi pada realisasi dan anggaran pajak hotel mengalami penurunan. Dengan demikian pajak hotel berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah di DKI Jakarta.

Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 dikarenakan adanya virus Covid-19 dengan kasus tinggi yang menggoyahkan perekonomian. Tingginya kasus covid-19 di Jakarta, pemerintah menetapkan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran virus tersebut. Pembatasan sosial berskala besar mengakibatkan banyak tempat pariwisata ditutup atau dibatasi sehingga berpengaruh terhadap tempat penginapan atau hotel yang tidak dihuni di DKI Jakarta sehingga pendapatan pada hotel turun.

### 3.9 Pajak Hiburan

Hasil uji statistik t pada penelitian ini, menunjukkan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah karena nilai P-value  $0,0012 < 0,05$  dengan koefisien 15,243 yang artinya Tolak Ho. Berdasarkan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah maka hasil penelitian ini adalah menerima hipotesis 3.

Penerimaan pajak hiburan dari tahun 2011 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan tetapi pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 1%. Setelah mengalami penurunan, tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan dan tahun 2020 terjadi penurunan kembali yang besar hingga 74%. Sedangkan untuk pendapatan asli daerah pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 19% dan pada masa pandemi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 18%. Kenaikan dan penurunan pajak hiburan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Pajak Hiburan setiap tahunnya memiliki target dan realisasi. Pada tahun 2011 hingga tahun 2013 dan tahun 2017 hingga tahun 2018 penerimaan pajak hiburan tidak mencapai target. Penerimaan yang didapatkan pada tahun 2011 sebesar 85%, tahun 2012 sebesar 92%, tahun 2013 sebesar 89%, tahun 2017 sebesar 94% dan pada tahun 2018 sebesar 93% masing-masing dari targetnya. Sedangkan untuk selain tahun tersebut target tercapai. Rata-rata penerimaan yang terealisasi dari tahun 2011-2020 adalah sebesar 5%. Pada tahun 2020 terjadi adanya pandemi virus covid-19 namun target pajak hiburan terealisasi sebesar 24%. Target pajak hiburan pada tahun 2020 diturunkan sebesar 75% dari target 2019.

Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 dikarenakan adanya virus Covid-19 dengan kasus tinggi yang menggoyahkan perekonomian. Tingginya kasus covid-19 di Jakarta, pemerintah menetapkan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran virus tersebut. Pembatasan sosial berskala besar mengakibatkan banyaknya tempat hiburan tutup seperti bioskop, pagelaran musik dan tempat hiburan yang sejenisnya sehingga pendapatan di tempat hiburan menurun karena tidak adanya pengunjung.

### 3.10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Hasil uji statistik t pada penelitian ini, menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah karena nilai P-value  $0,0003 < 0,05$  dengan koefisien 2,839 yang artinya Tolak Ho. Berdasarkan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah maka hasil penelitian ini adalah menerima hipotesis 4.

Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari tahun 2011 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan secara terus menerus tetapi dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat cukup besar yaitu 7%. Kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari tahun ke tahun rata-rata sebesar 14%. Sedangkan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2011 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan tetapi tahun 2018 mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 1%. Kemudian tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5% dan tahun 2020 terjadi penurunan kembali sebesar 18%.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap tahunnya memiliki target dan realisasi. Pada tahun 2011, 2012 dan tahun 2018 realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan target terealisasi sedangkan tahun 2013 hingga tahun 2017 dan tahun 2019 sampai 2020 target tidak terealisasi. Rata-rata penerimaan yang terealisasi dari tahun 2011-2020 adalah sebesar 16%. Pada tahun 2020 terjadi



adanya pandemi virus covid-19 target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan turun sebesar 6% dan target tidak terealisasi. Hal ini berbeda dengan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan yang tetap mencapai target di tahun 2020.

Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 dikarenakan adanya virus Covid-19 dengan kasus tinggi yang menggoyahkan perekonomian. Tingginya kasus covid-19 di Jakarta, pemerintah menetapkan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran virus tersebut. Disamping itu, pemerintah provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk meringankan kewajiban perpajakan bagi masyarakat. Adanya kebijakan tersebut maka penerimaan pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019.

### 3.11 Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji statistik t pada penelitian ini, menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah karena nilai P-value  $0,0010 < 0,05$  dengan koefisien 1,224 yang artinya Tolak Ho. Berdasarkan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah maka hasil penelitian ini adalah menerima hipotesis 5.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2011 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan secara terus menerus tetapi dari tahun 2020 mengalami penurunan hingga 11%. Kenaikan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun rata-rata sebesar 8%. Sedangkan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2011 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan tetapi tahun 2018 mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 1%. Kemudian tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5% dan tahun 2020 terjadi penurunan kembali sebesar 18%. Kenaikan dan penurunan pajak kendaraan bermotor mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya memiliki target dan realisasi. Pada tahun 2012, tahun 2014 dan tahun 2020 penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target. Penerimaan yang didapatkan pada tahun 2012 sebesar 99%, tahun 2014 sebesar 97%, dan tahun 2020 sebesar 98% masing-masing dari targetnya. Sedangkan untuk selain tahun tersebut target tercapai. Rata-rata penerimaan yang terealisasi dari tahun 2011-2020 adalah sebesar 3%. Pada tahun 2020 terjadi adanya pandemi virus covid-19 target pajak kendaraan bermotor turun sebesar 9% dan target tidak terealisasi. Hal ini berbeda dengan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan yang tetap mencapai target di tahun 2020.

Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 dikarenakan adanya virus Covid-19 dengan kasus tinggi yang menggoyahkan perekonomian. Tingginya kasus covid-19 di Jakarta, pemerintah menetapkan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran virus tersebut. Disamping itu, pemerintah provinsi DKI Jakarta memberikan insentif kepada wajib pajak berupa penghapusan denda pajak kendaraan. Adanya kebijakan tersebut maka penerimaan pada tahun 2020 mengalami penurunan sedikit dibandingkan dengan tahun 2019.

## 4. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan (1) Tidak terbukti pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah; (2) Tidak terbukti pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.; (3) Terdapat cukup bukti bahwa pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah; (4) Terdapat cukup bukti bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah; (5) Terdapat cukup bukti bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dan kesimpulan, dengan adanya keterbatasan waktu dan tenaga dalam penelitian ini maka peneliti memiliki saran (1) Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dalam penelitian dengan topik yang sejenis diharapkan untuk memperbanyak jumlah data agar penelitian memperoleh hasil yang baik; (2) Bagi Pemerintah DKI Jakarta, diharapkan untuk dapat meningkatkan pajak daerah terutama pada pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak kendaraan bermotor agar penerimaan pendapatan asli daerah meningkat. Semakin meningkatnya pendapatan asli daerah maka akan semakin baik pemerintahannya.

**Daftar Pustaka**

- Biringkanae, A., & Tammu, R. G. (2021). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja*. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, Vol 4 No 1, 19–25.
- Bisnis.com. (2020). *Pemprov DKI Jakarta Kaji APBD 2020, PAD Diproyeksikan Rp28 Triliun*. <https://jakarta.bisnis.com/read/20200811/77/1277689/pemprov-dki-jakarta-kaji-apbd-2020-pad-diproyeksikan-rp28-triliun>. Diakses 5 Desember 2021.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* (12th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Denor, A., Djou, L. D. G., & Ismail, N. (2021). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende*. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, Vol 1 No 2, 24–31.
- Ghozali, J. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jakarta, B. P. S. D. (2020). *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi DKI Jakarta 2018-2020*. <https://jakarta.bps.go.id/indicator/17/786/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan-unit-di-provinsi-dki-jakarta.html>. Diakses 6 Desember 2021.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (2019th ed.). Andi.
- Marta, I. N. G., Terimajaya, I. W., & Astawa, I. N. W. (2020). *Pengaruh Penerimaan Pbb P2 Dan Bphtb Terhadap Pad Kabupaten Bandung Tahun 2013–2019*. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, Vol 17 No 2, 186–192.
- Nugrahwati, R. E., Marwoto, P. B., & Mulyani, H. T. S. (2019). *Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Keuangan*, Vol 7 No 2, 41–50.
- Provinsi DKI Jakarta. 2010. *Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah*. Jakarta.
- Provinsi DKI Jakarta. 2010. *Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel*. Jakarta.
- Provinsi DKI Jakarta. 2011. *Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran*. Jakarta.
- Provinsi DKI Jakarta. 2011. *Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan*. Jakarta.
- Provinsi DKI Jakarta. 2015. *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor*. Jakarta.
- Provinsi DKI Jakarta. 2015. *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undag-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (11 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Rianto, J. (2021). *Pengaruh Pajak Hotel, Restoran Dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang (Periode 2011-2015)*. *Ekonomi Bisnis*, Vol 27 No 2, 754–762.
- Setiawan, D. (2021). *Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2019*. *Jisipol| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol 5 No 3.



Setiawati, N., Wahyudi, S., & Aulia, N. (2021). *Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol 21 No 3, 1002–1010.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (12 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.

Wulandari, D. A., & Kartika, A. (2021). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Derivatif: Jurnal Manajemen, Vol 15 No 2, 164–179.

Yanuar, A., & Agoes, S. (2019). *Pengaruh PBB, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pad Dki Jakarta 2014-2016*. Jurnal Paradigma Akuntansi, Vol 1 No 3, 946–955.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.